



ARAH KEBIJAKAN BNSP UNTUK INDONESIA KOMPETEN



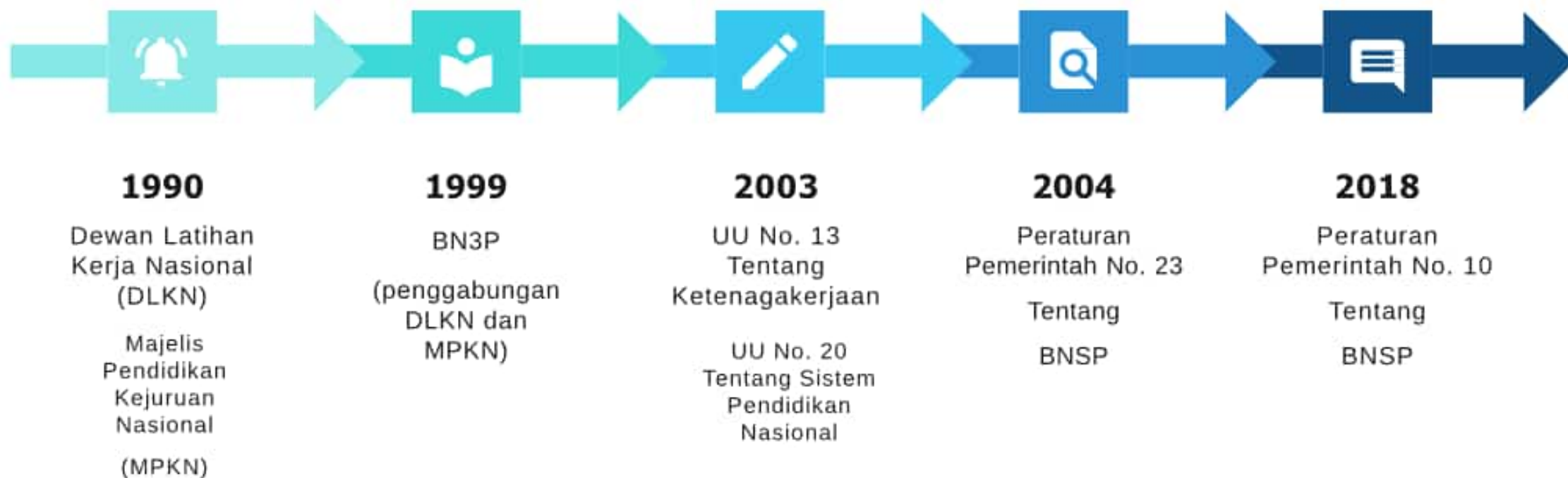
KOMISIONER BNSP PERIODE 2018-2023

- ❑ KETUA : KUNJUNG MASEHAT
- ❑ WAKIL KETUA : MIFTAKUL AZIS
- ❑ ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG JAMINAN MUTU, PERENCANAAN, KERJASAMA, HUKUM DAN UMUM : TETTY DS ARIYANTO
- ❑ ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG SERTIFIKASI : BONARDO ALDO TOBING
- ❑ ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG LISENSI : MULYANTO
- ❑ ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN SDM : MUHAMMAD ZUBAIR
- ❑ ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI. : HENNY S. WIDYANINGSIH



Perjalanan Sistem Kompetensi Nasional

Merupakan pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan **SKB 3 Menteri** (Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Perindustrian) dan **Ketua Umum Kadin Indonesia**



TUGAS DAN FUNGSI BNSP

MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

01

Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja

03

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional

05

Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi



02

Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi

04

Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional

06

Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Berdasarkan PP 10 tahun 2018
Tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

ISU STRATEGIS



**Kondisi Eksisting
Ketenagakerjaan**



Bonus Demografi



MEA

(Masyarakat Ekonomi ASEAN)



Industri 4.0

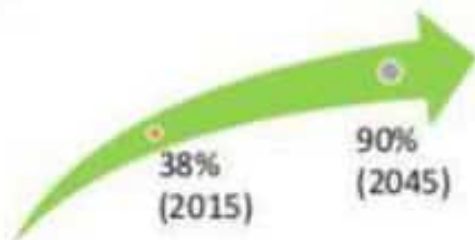
KONDISI KETENAGAKERJAAN



Masih tingginya *mismatch* antara kebutuhan dan ketersediaan *skill* tenaga kerja



Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja berketerampilan menengah-tinggi



Kebutuhan Pekerja Terampil 2045

Skill Mismatch

Demand

Better Skills

Labor Market Flexibility

Berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi yang menimbulkan potensi disrupsi dan menciptakan jenis pekerjaan baru



Belum optimalnya proses perpindahan pekerja di pasar kerja



BONUS DEMOGRAFI

Rasio Ketergantungan
per 100 Penduduk adalah 51%

TAHUN 2025 – 2035

- Usia Produktif mencapai 70 %
- Usia Muda (15 – 35 tahun) mencapai 30 %

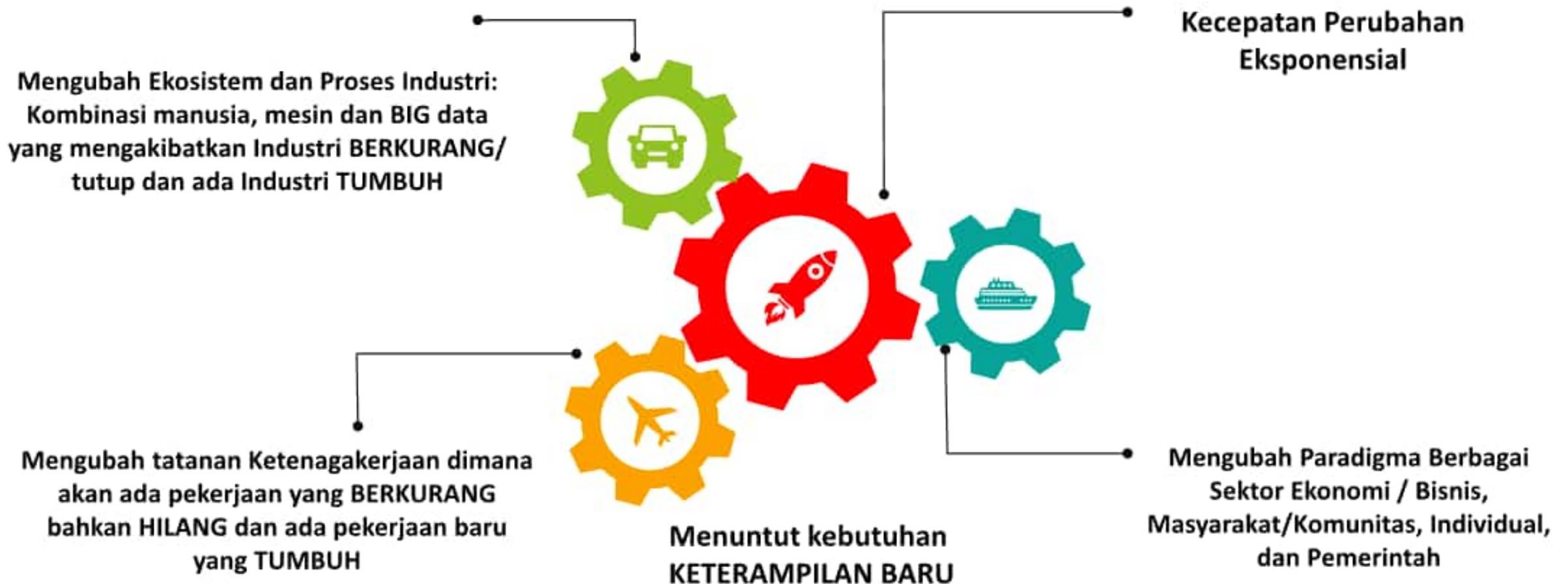


Kunci Mengelola Bonus Demografi:

- Kesehatan
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Iklim Ketenagakerjaan

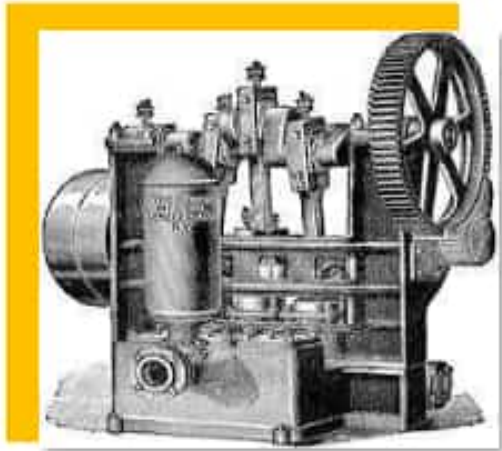
REVOLUSI INDUSTRI

INDUSTRY 4.0



ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: CYBER PHYSICAL SYSTEM

Revolusi Industri ke 4 adalah sebuah *Silent Revolution* dan disebut juga *Economic Disruption*, menuntut setiap individu benar-benar kompeten dan bersertifikat untuk *personal branding*.



INDUSTRI 1.0
1784

Mechanization, steam power, Weaving loom



Smart Houses



Smart Factories



INDUSTRI 2.0
1870

Mass Production, Assembly line, electrical energy



INDUSTRI 3.0
1969

Automation, computers, And electronics



Smart Offices



Autonomous Vehicle



INDUSTRI 4.0
SEKARANG

Cyber Physical Systems, Internet of things, network



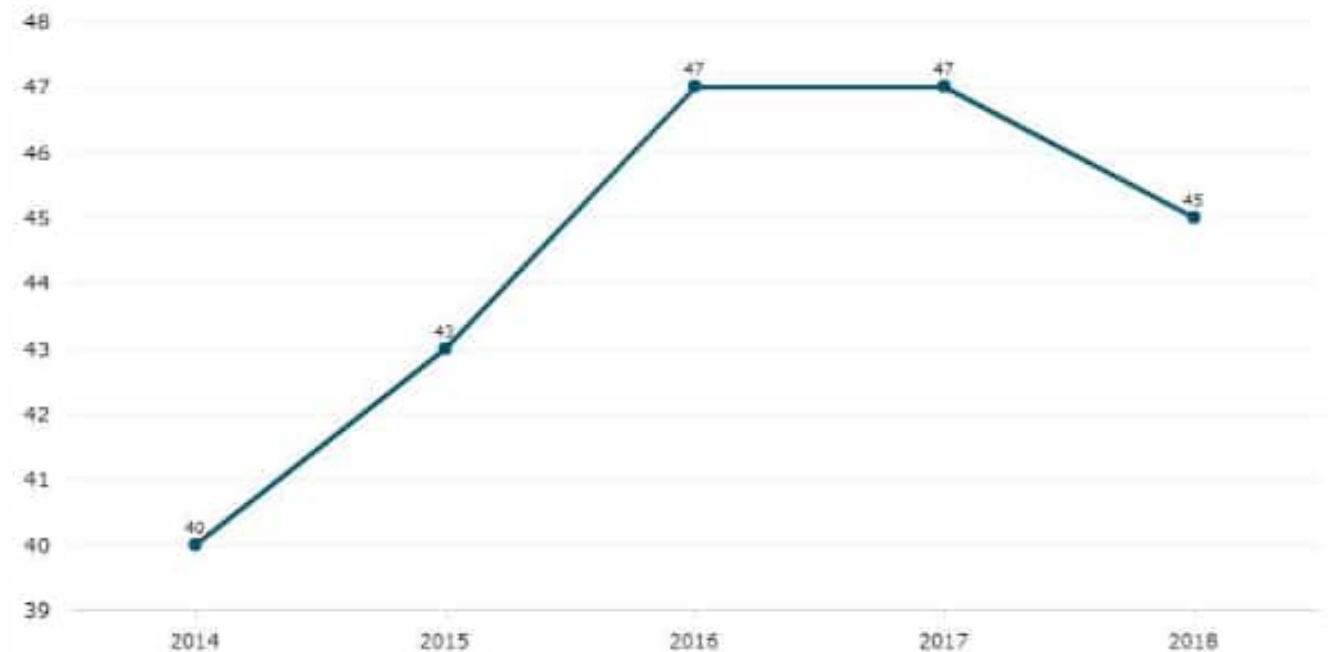
PETA DAYA SAING TENAGA KERJA INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

Produktivitas Pekerja (ribuan US\$)

| Negara | 2015 | 2016 ▲ | Perubahan (%) |
|-----------|-------|--------|---------------|
| Singapura | 127.8 | 131.9 | 3.2 |
| Malaysia | 55.7 | 56.4 | 1.3 |
| Thailand | 26.5 | 28.3 | 6.8 |
| Indonesia | 24.3 | 24.9 | 2.5 |
| Filipina | 18.1 | 18.7 | 3.3 |
| Laos | 11.1 | 11.5 | 3.6 |
| Myanmar | 5.7 | 10.6 | 86.0 |
| Vietnam | 9.6 | 10.2 | 6.3 |
| Kamboja | 5.7 | 6.2 | 8.8 |

Chart: Putu Agus Pransuamitra • Source: Asian Productivity Organization

Peingkat Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia



katadata

databoks

Tingkat produktivitas pekerja di Indonesia masih tertahan di peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Data dari Asian Productivity Organization (APO) menunjukkan tingkat produktivitas per pekerja Indonesia pada tahun 2016 sekitar US\$ 24.900 atau setara dengan Rp 354 juta (asumsi kurs Rp 14.200/US\$).

SDM UNGGUL

Sertifikasi diharapkan dapat menjamin **sumber daya manusia yang memiliki *skill* dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industry (*link & match*)**

Link & Match with Industry

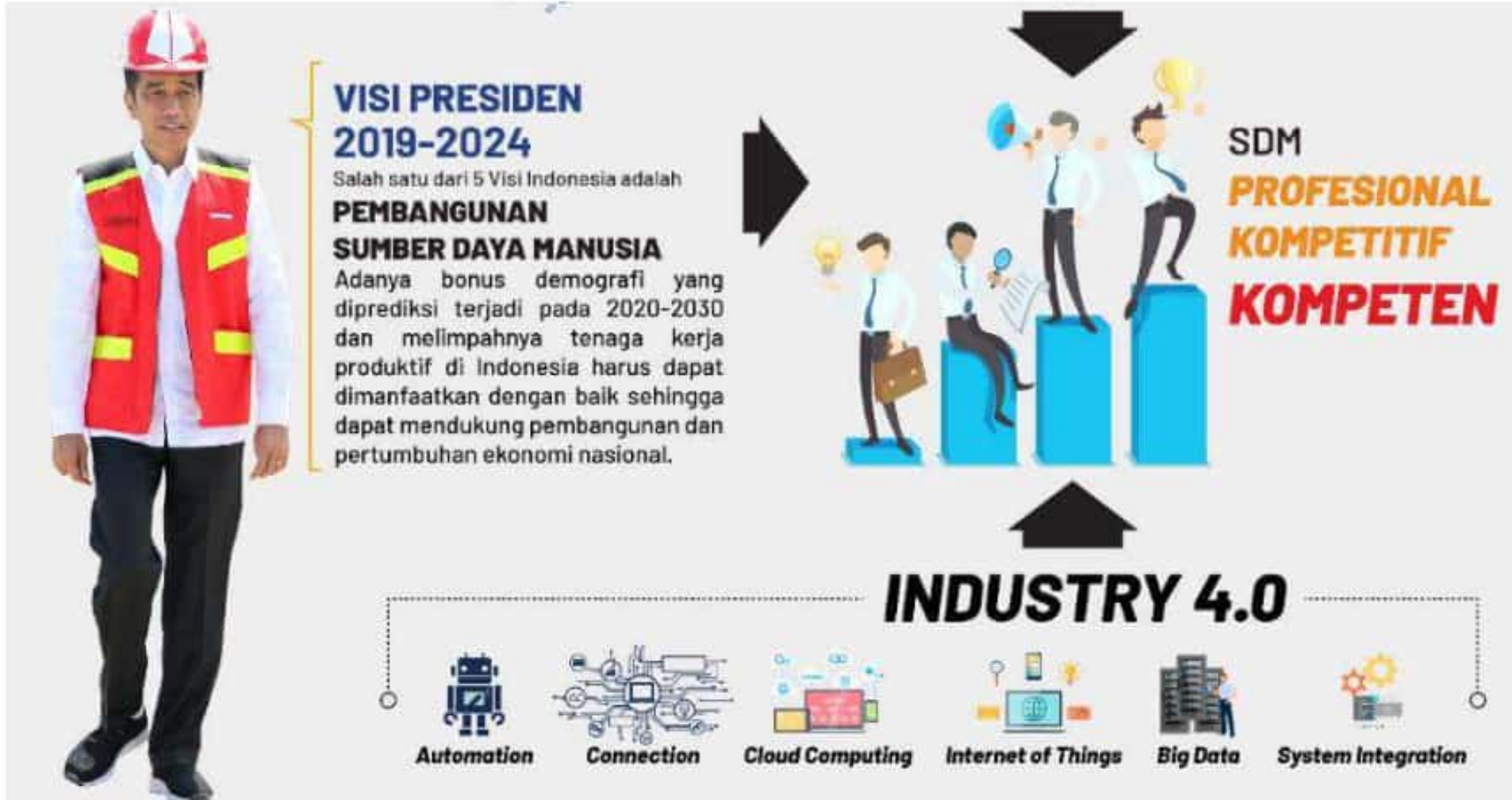
Skill/Agility & Dynamic

High Competitiveness

Characteristic & Serve



TARGET DAN PELUANG PENGEMBANGAN SDM DI INDONESIA



Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Masih Rendah, hanya 21% dari Amerika Serikat. **Laju Pertumbuhan Produktivitasnya** lebih lambat dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Sumber: Asian Productivity Organization, Sept 2018

| Laju pertumbuhan produktivitas beberapa negara ASEAN tahun 2016 | |
|---|-------|
| Indonesia | 1,37% |
| Malaysia | 2,16% |
| Vietnam | 4,39% |
| Thailand | 5,28% |

Daya Saing Indonesia Membaik, Naik 11 Peringkat ke Posisi 32 Dunia

Peringkat daya saing Indonesia menurut IMD World Competitiveness ranking 2019 membaik. Indonesia melejit ke posisi 32 Dunia dibandingkan tahun 2019 pada peringkat 43. IMD menggunakan empat indikator utama dalam penilaiannya, yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Indonesia menunjukkan perbaikan daya saing yang paling menggembirakan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini berkat perbaikan efisiensi di sektor pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan iklim bisnis. IMD juga menyebut salah satu keunggulan Indonesia adalah upah buruh yang rendah dibandingkan 63 negara lainnya di Asia Pasifik. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di bawah Jepang dan Perancis yang berada di Posisi ke-30 dan ke-31. Adapun Republik Ceko dan Kazakhstan berada di bawah Indonesia, masing-masing di posisi ke-33 dan ke-34. Sedangkan Singapura berada peringkat ke-1, Malaysia peringkat ke-22, Thailand peringkat ke-25, dan Jepang peringkat ke 30.

Sumber: IMD Wo

TANTANGAN DISRUPSI PASAR KERJA: TEKNOLOGI DAN OTOMATISASI

**52,6 JUTA
(51,8%)**

Potensi
pekerjaan yang
HILANG

Pekerjaan hilang ≠ pengangguran

Teknologi mendorong terciptanya jenis pekerjaan baru yang lebih produktif dan lebih besar jumlahnya.



49%

PERTANIAN, KEHUTANAN,
PRIKANAN, PERBURUAN



65%

PENGOLAHAN/
MANUFATUR



53%

PERDAGANGAN
RETAIL



45%

KONSTRUKSI



64%

TRANSPORTASI DAN
PERGUDANGAN

Potensi otomatisasi
berdasarkan sektor

Potensi otomatisasi
berdasarkan okupasi



BURUH TANI,
NELAYAN,
PETERNAK, PEKERJA
KERAJINAN



PENJAHIT,
OPERATOR MESIN
STASIONER, TUKANG
LAS & SOLDER



TENAGA
PENJUALAN,
PEDAGANG KAKI
LIMA, KASIR,
PETUGAS TIKET



BURUH
BANGUNAN,
PANDAI BESI



PEGAWAI
ADMINISTRASI,
PETUGAS GUDANG,
LAINNYA

LAPANGAN KERJA DIMASA DEPAN: JENIS OKUPASI YANG BERKEMBANG



MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 8 PROFESI YANG TERKENA MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA)

- ❖ **ARSITEK**
- ❖ **INSINYUR**
- ❖ **AKUNTAN**
- ❖ **DENTIST**
- ❖ **TENAGA SURVEI BIDANG PENGUKURAN BUMI**
- ❖ **PRAKTISI MEDIS**
- ❖ **PERAWAT**
- ❖ **TENAGA PARIWISATA**

AMANAT TENAGA KERJA KOMPETEN

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan



PP. No 31 tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

PP No. 10 tahun 2018 tentang BNSP



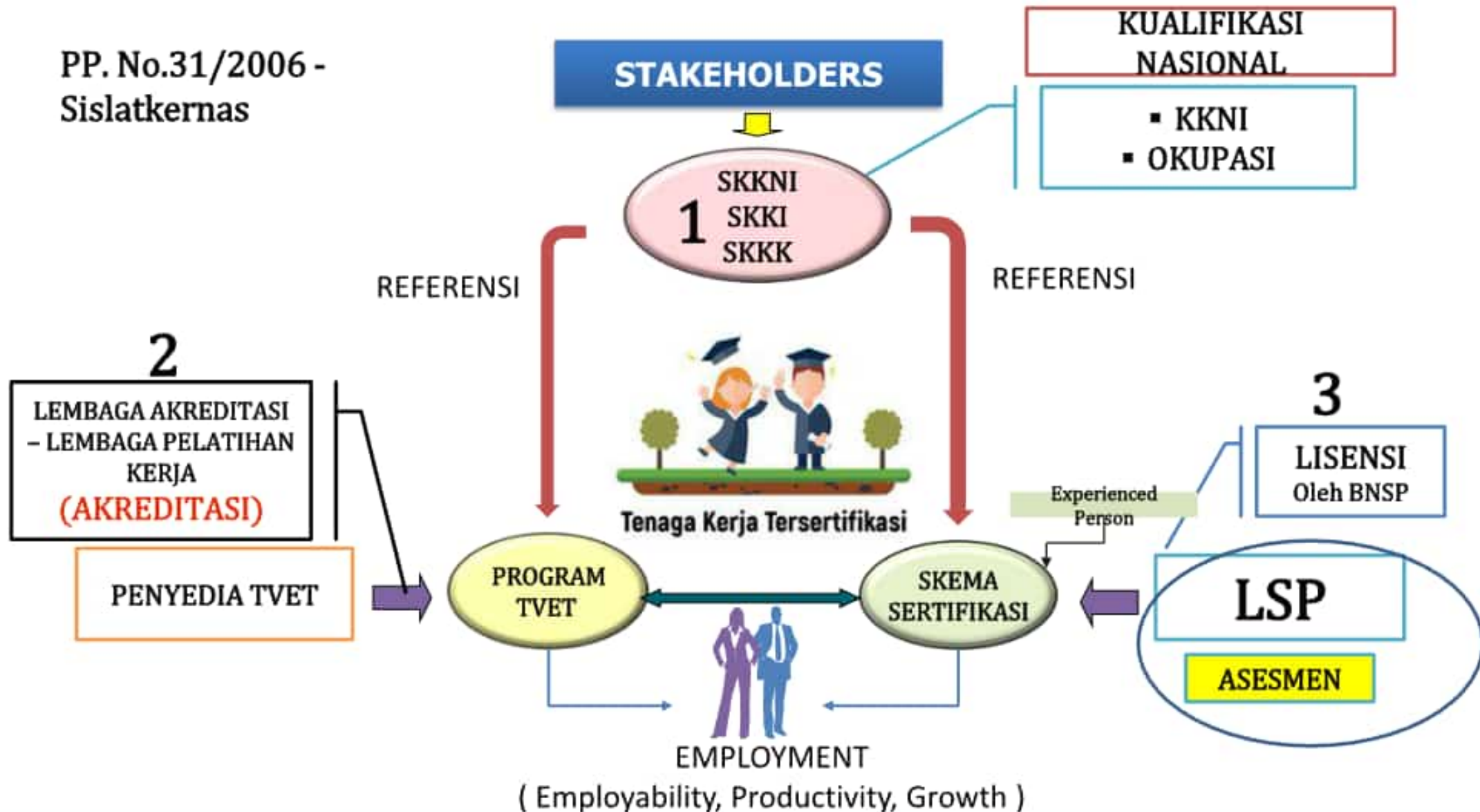
Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/ KKNI



Intruksi presiden No. 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengan Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia

TIGA PILAR SDM BERBASIS KOMPETENSI

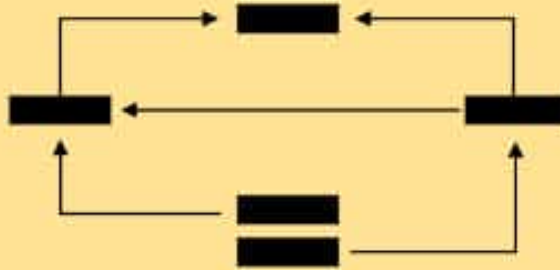
PP. No.31/2006 -
Sislatkernas



INFRASTRUKTUR SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL



STANDAR KOMPETENSI KERJA (SKKNI, SKK KHUSUS YANG TEREGISTRASI, SKK INTERNASIONAL YANG TEREGISTRASI)



SKEMA SERTIFIKASI



ASESOR KOMPETENSI



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

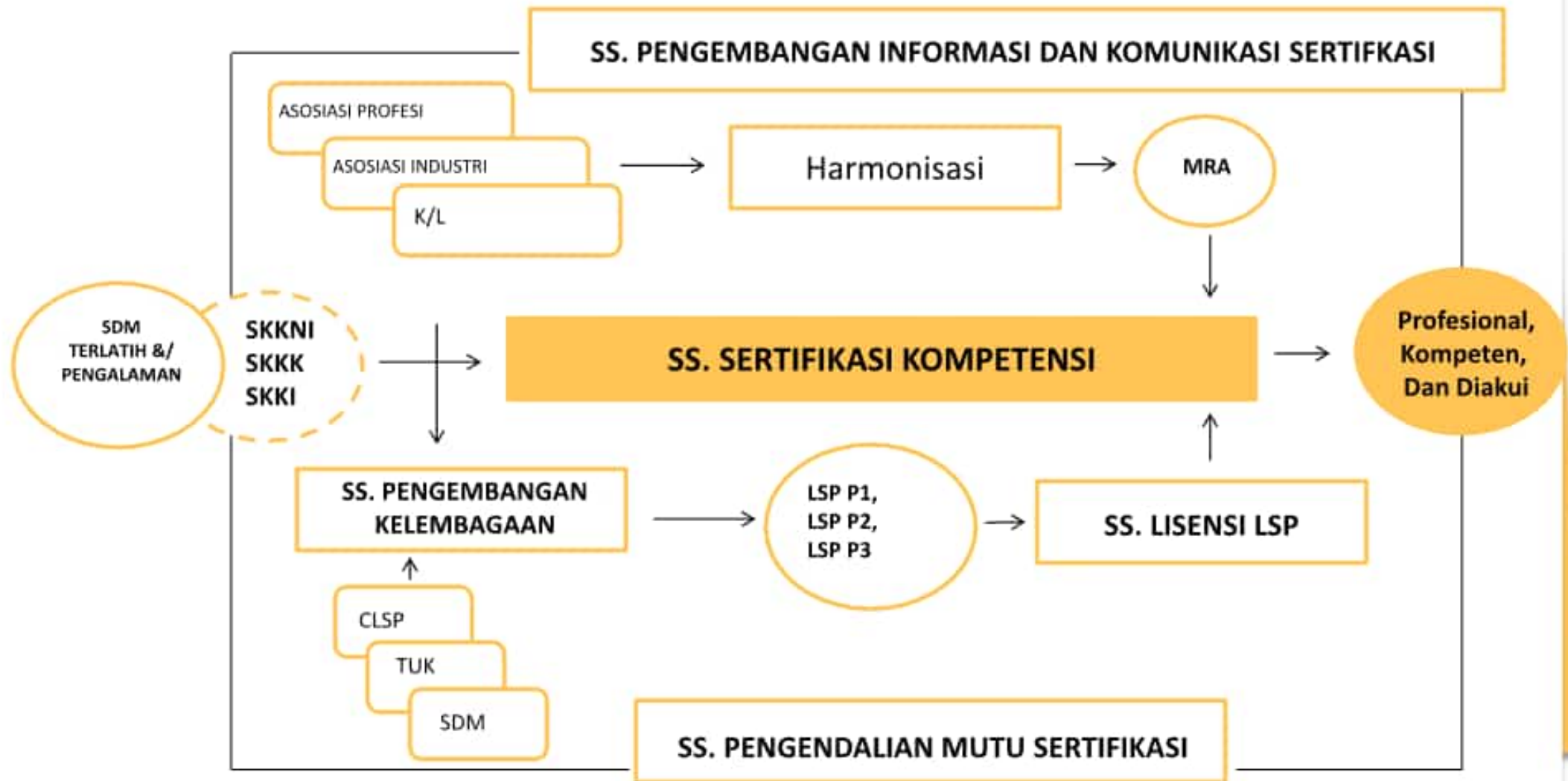


MATERI UJI KOMPETENSI



TEMPAT UJI KOMPETENSI

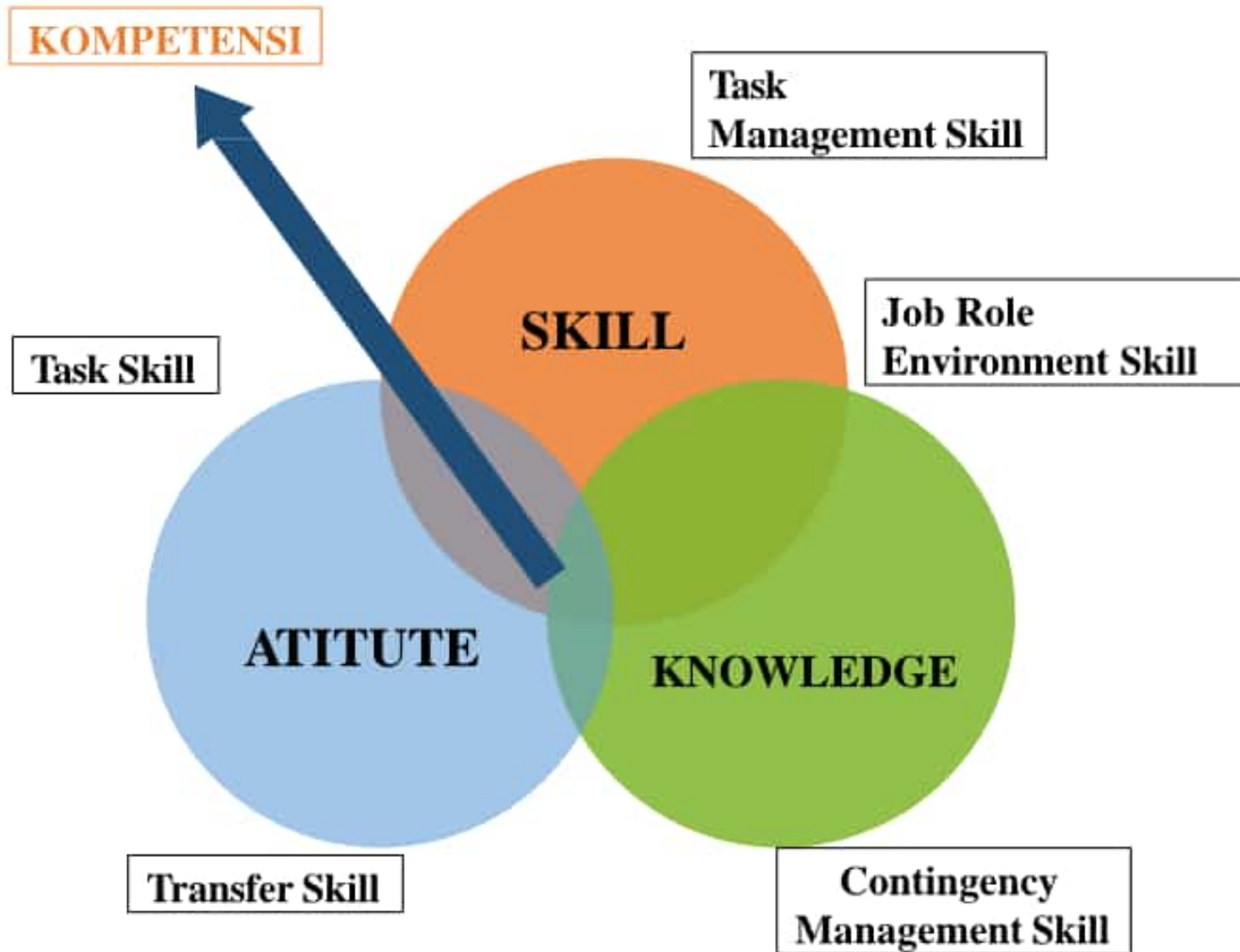
Sistem Nasional Sertifikasi Profesi



LINGKUNGAN STRATEGIS



KOMPETENSI



Kompetensi Kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi (pengakuan) terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan.



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

**BAB VII
PASAL 23**

Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.

**KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PERPRES NOMOR 8 TAHUN 2012**



DIT BELMAWA, 2012

PENGEMBANGAN KARIR (DUDI, LATKER, MASY)



2012

PENJAMINAN MUTU DAN PENGAKUAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Dalam Rangka MRA/MRS

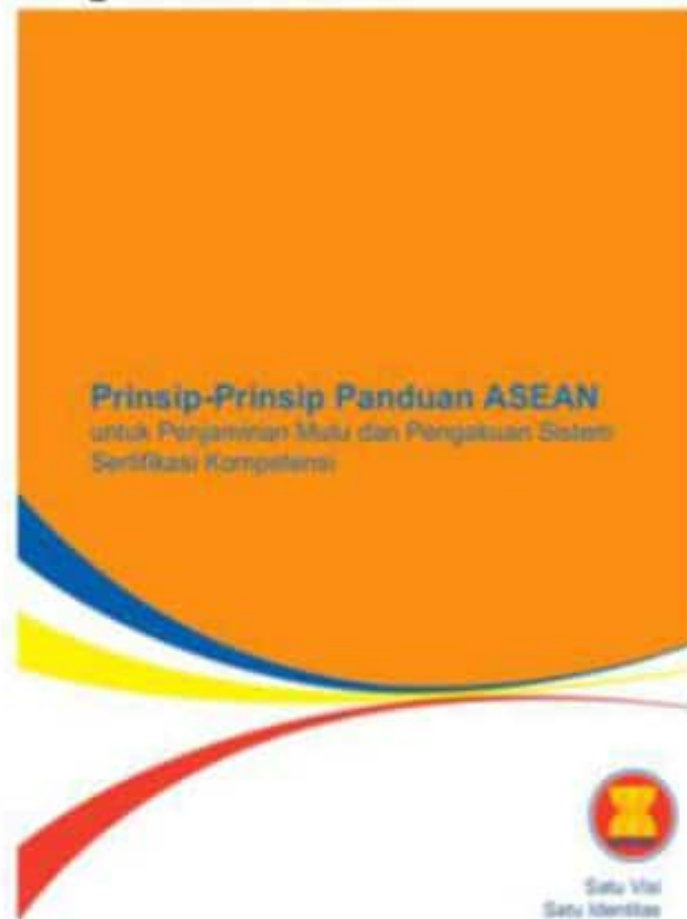


ASEAN QUALIFICATIONS REFERENCE FRAMEWORK

Endorsed by the ASEAN Economic Ministers in August 2014, the ASEAN Education Ministers in September 2014 and the ASEAN Labour Ministers through Ad Hoc Meeting from November 2014 to May 2015



2014



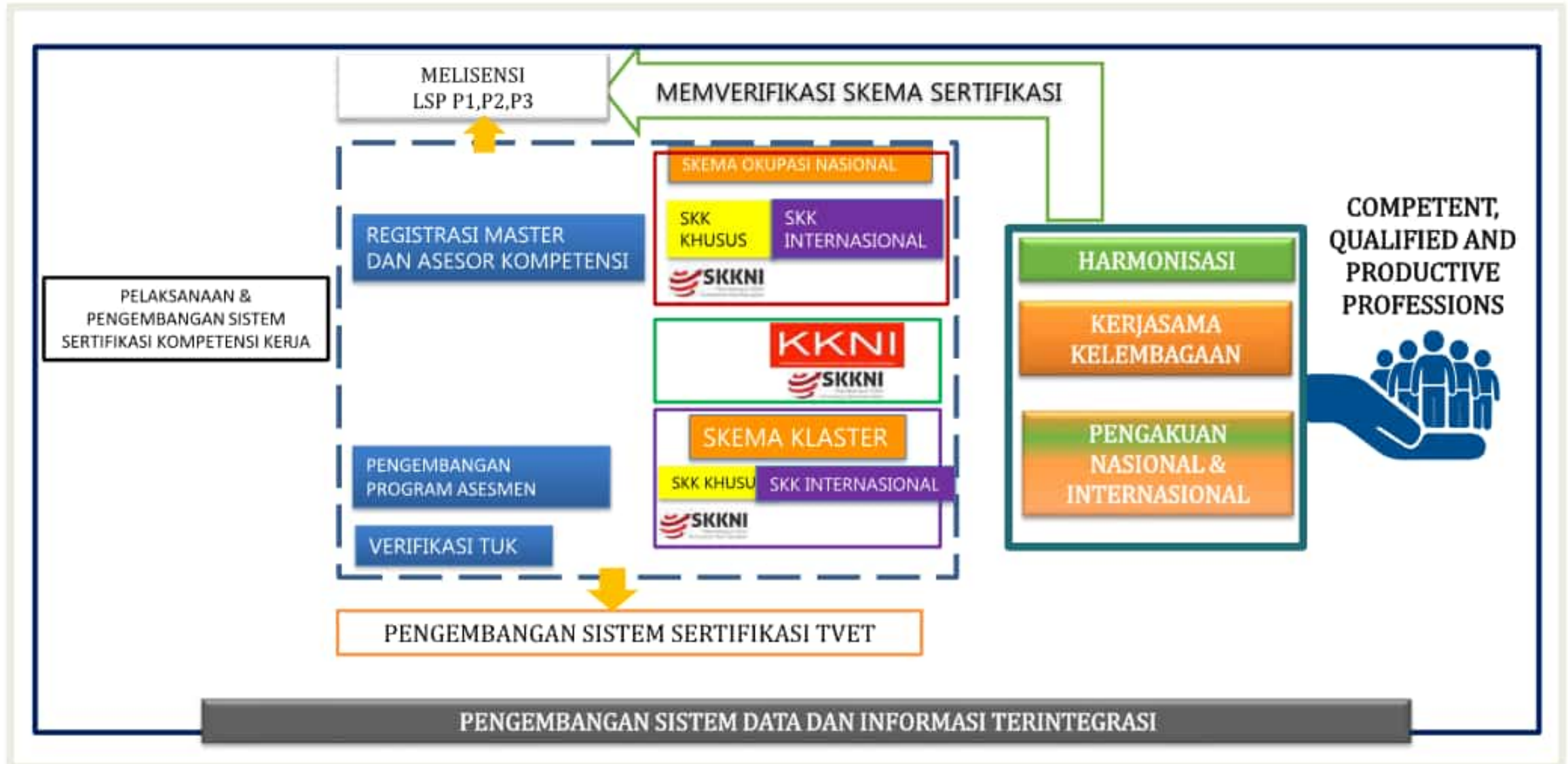
Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN
untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem
Sertifikasi Kompetensi



Satu Visi
Satu Identitas
Satu Komunitas

PUBLIKASI 2016 /
TERJEMAHAN 2018

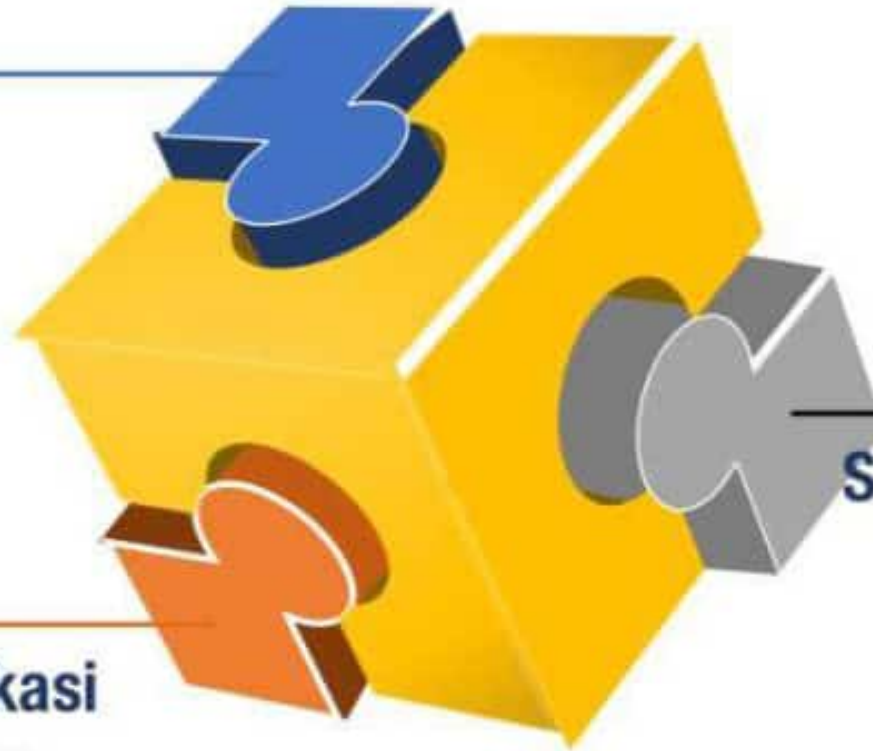
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM JAMINAN MUTU



JENIS SKEMA SERTIFIKASI

Skema Sertifikasi
Berdasarkan
Kerangka
Kualifikasi
Nasional
Indonesia

Skema Sertifikasi
Berdasarkan
Okupasi Nasional



Skema Sertifikasi
Berdasarkan
Pemaketan
Kompetensi
(Cluster)

SKKNI: **Ketelusuran/Interface** Penerapan Pada Industri, Pendidikan Dan Sertifikasi

| PENERAPAN PADA INDUSTRI | SKKNI SKKI, SKK | PENERAPAN PADA PENDIDIKAN → DACUM → CP | SERTIFIKASI KOMPETENSI |
|-----------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Judul SOP ≈ | Judul Unit Kompetensi ≈ | Judul Materi Pembelajaran ≈ | Judul Sertifikat; unit kompetensi ≈ |
| Ruang Lingkup SOP ≈ | Deskripsi Unit ≈ | Ruang lingkup Materi pembelajaran ≈ | Ruang lingkup asesmen ≈ |
| Langkah utama proses ≈ | Elemen ≈ | Tujuan Instruksional khusus (Learning Objectives) ≈ | Elemen ≈ |
| Instruksi kerja ≈ | Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ≈ | Kriteria Unjuk Kerja ≈ | Kriteria Pencapaian kompetensi ≈ |
| Spesifikasi sesuai kontek ≈ | Batasan variabel ≈ | Kontekstualisasi pembelajaran ≈ | Konteks asesmen ≈ |
| QA ≈ | Panduan penilaian ≈ | Evaluasi ~ Indikator Kompetensi ≈ | Panduan asesmen ≈ |

PENJAMINAN MUTU DAN PENGAKUAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI



ARAH KEBIJAKAN BNSP

**PERBAIKAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN**



PENGEMBANGAN SDM BNSP



**PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN LSP**



**PENGEMBANGAN SISTEM
DATA DAN INFORMASI**



**PENGEMBANGAN MASTER
ASESOR DAN ASESOR**

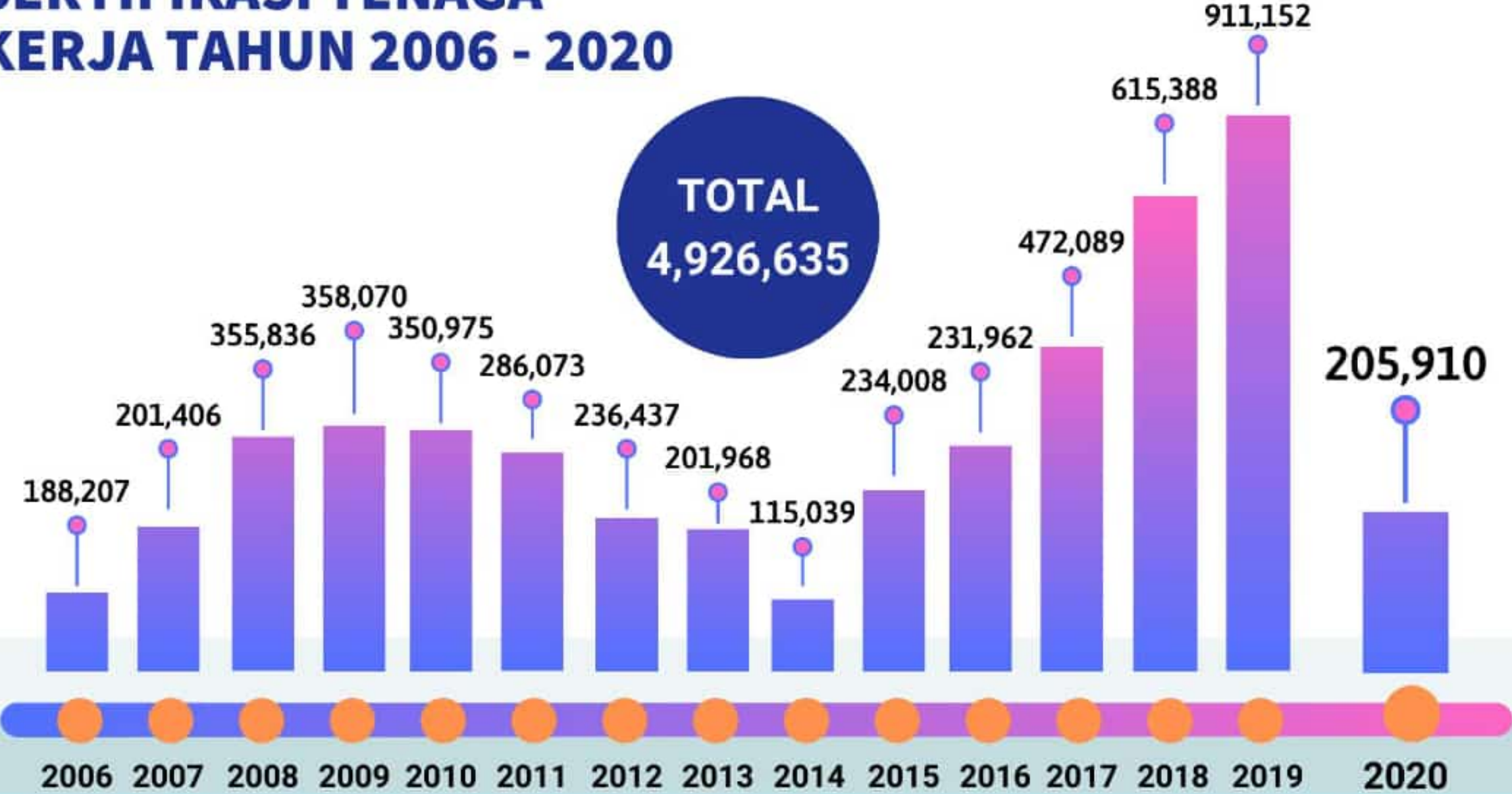


**PENJAMINAN MUTU
PELAKSANAAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI**



**PENINGKATAN KERJASAMA UNTUK
SALING PENGAKUAN SISTEM
SERTIFIKASI BAIK NASIONAL /
INTERNASIONAL**

SERTIFIKASI TENAGA KERJA TAHUN 2006 - 2020



SUMBER : DATA BNSP, JUNI 2020

KLASIFIKASI JENIS LSP

01

LSP PIHAK KE TIGA

LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

02

LSP PIHAK KE DUA

LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

03

LSP PIHAK KE SATU INDUSTRI

LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

04

LSP PIHAK KE SATU LEMBAGA DIKLAT

LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

SUMBER DAYA SERTIFIKASI

ASESOR

JUMLAH ASESOR YANG TERREGISTRASI DI WEB ADALAH 40.167 ORANG

40.167



MASTER ASESOR

JUMLAH MASTER ASESOR 125 ORANG

125



TUK

JUMLAH TUK YANG TERREGISTRASI DI WEB ADALAH 13.574 TUK

13.574



LSP P1
1.427

LSP P2
81

LSP P3
299

TOTAL
1.807

SEBARAN LSP



| | |
|------------------------|------|
| ACEH | : 32 |
| SUMATERA UTARA | : 31 |
| SUMATERA BARAT | : 51 |
| RIAU | : 20 |
| KEPULAUAN RIAU (KEPRI) | : 14 |
| BENGKULU | : 5 |
| JAMBI | : 5 |
| KEP. BANGKA BELITUNG | : 13 |
| SUMATERA SELATAN | : 32 |
| LAMPUNG | : 35 |
| BANTEN | : 44 |

| | |
|---------------------|-------|
| DKI JAKARTA | : 331 |
| JAWA BARAT | : 282 |
| JAWA TENGAH | : 244 |
| JAWA TIMUR | : 379 |
| D.I YOGYAKARTA | : 62 |
| BALI | : 62 |
| NUSA TENGGARA BARAT | : 15 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | : 11 |
| KALIMANTAN BARAT | : 11 |
| KALIMANTAN UTARA | : 2 |
| KALIMANTAN TENGAH | : 10 |

| | |
|--------------------|------|
| KALIMANTAN TIMUR | : 14 |
| KALIMANTAN SELATAN | : 19 |
| SULAWESI BARAT | : 11 |
| SULAWESI SELATAN | : 29 |
| SULAWESI TENGAH | : 4 |
| SULAWESI TENGGARA | : 1 |
| SULAWESI UTARA | : 12 |
| GORONTALO | : 3 |
| MALUKU | : 7 |
| MALUKU UTARA | : 4 |
| PAPUA | : 7 |
| PAPUA BARAT | : 6 |

SEBARAN ASESOR



TOTAL
40.167

ACEH : 274
SUMATERA UTARA : 691
SUMATERA BARAT : 1.158
RIAU : 535
KEPULAUAN RIAU (KEPRI) : 294
BENGKULU : 102
JAMBI : 86
KEP. BANGKA BELITUNG : 181
SUMATERA SELATAN : 516
LAMPUNG : 553
BANTEN : 1.250

DKI JAKARTA : 4.602
JAWA BARAT : 7.299
JAWA TENGAH : 5.856
JAWA TIMUR : 8.206
D.I YOGYAKARTA : 1.681
BALI : 1.298
NUSA TENGGARA BARAT : 289
NUSA TENGGARA TIMUR : 223
KALIMANTAN BARAT : 276
KALIMANTAN UTARA : 21
KALIMANTAN TENGAH : 178

KALIMANTAN TIMUR : 833
KALIMANTAN SELATAN : 697
SULAWESI BARAT : 92
SULAWESI SELATAN : 1.127
SULAWESI TENGAH : 36
SULAWESI TENGGARA : 52
SULAWESI UTARA : 323
GORONTALO : 47
MALUKU : 141
MALUKU UTARA : 36
PAPUA : 247
PAPUA BARAT : 59

SEBARAN MASTER ASESOR



TOTAL : 125 ORANG

BNSP GO DIGITAL

E-LISENSI

PENAMBAHAN
RUANG
LINGKUP
SKEMA

RE-LISENSI

SURVEILLANCE

REGISTRASI
ASESI

PELATIHAN
LISENSI

PEKERJA
DOMESTIK

PELATIHAN
ASESOR
KOMPETENSI

PENGAJUAN
RCC

STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK

E-ASESOR

E-LEARNING

E-OFFICE

SISTEM
INFORMASI
EKSEKUTIF

HELPDESK

Kegiatan Data Informasi BNSP Tahun 2019/2020

1

Lanjutan
membangun sistem
informasi BNSP

3

- Media Sosial
- Videotron
- Iklan Layanan Masyarakat
 - Pameran
 - Leaflet
- Buku Data dan Informasi
- Dialog Interaktif Media TV dan Radio
 - Rebranding
- Lomba Logo BNSP
 - Billboard
 - BNSP Award

5

Pengembangan
sistem data dan
info LSP

7

Penyusunan buku dan
Informasi sertifikasi

2

Bimtek Penggunaan
Aplikasi Pelayanan
Sertifikasi

4

Pengelolaan
Website

6

Pengembangan
Pelayanan
Publik

8

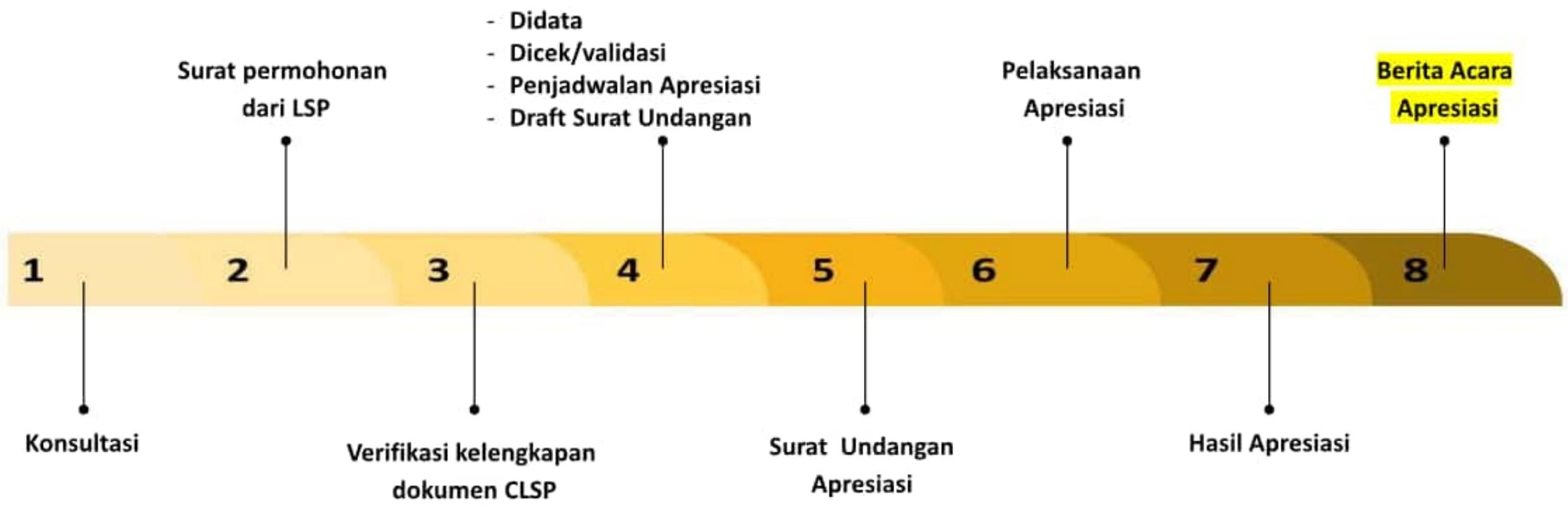
Call Center

ALUR PELAYANAN PERSURATAN BNSP





ALUR LISENSI didahului kegiatan APRESIASI



ALUR PEMBERIAN LISENSI



TOTAL 90 HARI KERJA

SERTIFIKAT LISENSI

ALUR PEMBERIAN RELISENSI



SERTIFIKAT RELISENSI

“ TOTAL 60
HARI KERJA

ALUR PENGAJUAN ASKOM DAN RCC



**TOTAL 50
HARI KERJA**

ALUR PERMINTAAN DATA OLEH EKSTERNAL



Pihak external menerima data



Terimakasih..